

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Dahlan,dkk. 1996. *“Khilafah”*, dalam *Ensiklopedi hukum Islam, Jilid 3*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve.
- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Ari Dwipayana. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE.
- Fauzan, Encik Muhammad. 2017. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Joko Purnomo. Dkk. 2008. *Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik (Pelaksanaan Good Governance di Tingkat Desa)*. Yogyakarta: Penerbit Institute for Research and Empowerment (IRE)
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Yogyakarta.
- Hasan,Muhammad Thohir. 2004.*Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*. Jakarta: PT. Lantabora Press.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Jokowi Widodo. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya:Insan cendekia.
- Khushandajani.2018. *Kewenangan Desa dan Penyelenggara Pemerintah Desa Diponegor*. Semarang:Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.
- Nimatul Huda, 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Nyoman Beratha. 1982. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sirajuddin, Didik Sukriano, Winardi. 2012. *“Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)”*. Jakarta : Setara Pres.

Soedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2001. *Birokrasi Dalam Polemik*. Malang:Pustaka Pelajar.

Unang Sunardjo. 1984. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Penerbit Tarsito.

Widjaja AW. 2001. *KepemimpinanPemerintahanDaerah*. Bandung:Bahan Kuliah.

JURNAL DAN SKRIPSI

Ahmad Muklis, 2015. "Implementasi Prinsip Good GovernanceDi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Kantor Kuwu Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)" *Skripsi Universita Muhammadiyah Surakarta*. vol.23 No.12.

Arif Sumeru, 2016. "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" *jurnal Hukum dan Pemerintahan*, vol.4, no.1

Departemen Teknik Planologi ITB, 2014. "Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governanace". *Jurnal ITB*, Vol.15 No.1

Emi Hariyati. 2015. "Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur" *Jurnal* vol.3, no.4

Fitria Andalus H. 2019. "Implementasi Good Governance di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol.11, No. 1.

Maszlee Malik. 2016. "Tata kelola Kerajaan yang Baik (Good Governance)" *Jurnal Gerakan Islam dan Rashid Al-Ghannouci*". Vol.17.

Muh Iqbal. 2016. "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kuwu di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng) " *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*.

Sunardi, Darma Yanti, Wendi Ariansyah, 2019. "Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap KinerjaPemerintah Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akutansi* Vol.13, No.2.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. pasal 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 1 ayat 4 Nomor 82 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 43.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Pasal 24 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Pasal 102 Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Tambahan

Putri, Lia Sartika. 2016. “Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa”. Jurnal Legislasi
Indonesia, Vol.13 No.2.

Rifa'i, Tsalis. 2015. “Komunikasi dalam Musyawarah (Tinjauan Konsep Asyura dalam
Islam)”, Jurnal Channel, Vol.3 No. 1.

Rindiani, Ludiah. 2017. “Kajian Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan
Permasyarakatan Desa untuk Membangun Desa berdasarkan Undang-Undang No 6
Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten
Jember)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Rumkel, Lutfi, Belinda Sam dan M Chairul Basrun Umanailo. 2020. “Hubungan Kepala
Desa, Badan Permasyarakatan Desa Serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan
Pembangunan Desa”, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 11
No. 1.

